

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki visi, yaitu:

“Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera”

Berikut penjelasan terkait visi tersebut:

- **Maju:** Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatnya partisipasi public, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang professional. Selain itu, pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan tercapainya kemandirian daerah.
- **Adil:** Kabupaten Pekalongan senantiasa memberikan keadilan bagi masyarakat dengan dilandasi oleh adanya kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup, memperoleh layanan public, layanan pendidikan dan kesehatan, serta untuk memaknai hak politiknya dan tidak adanya separasi dalam bentuk apapun.
- **Sejahtera:** Suatu kondisi keadaan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju dan adil dilengkapi dengan meningkatnya pendapatan dan pengeluaran ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kemampuan daya beli serta menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

Untuk mengamalkan visi-visi Kabupaten Pekalongan di atas, maka ditempuh melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing daerah, berarti usaha untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang berdaya saing tinggi guna menghadapi tantangan era globalisasi serta mampu menggunakan peluang yang ada.
2. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas, berarti mengembangkan kapasitas ekonomi daerah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek.
3. Mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dan demokrasi, berarti usaha dalam menciptakan tata kelola kehidupan publik, birokrasi dan swasta dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembangunan serta untuk penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance*.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan, adalah upaya untuk meminimalisir adanya kesenjangan antarwilayah dan menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dalam masyarakat.
5. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui keadilan sosial, adalah salah satu bentuk usaha mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul, khususnya pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
6. Memberikan layanan dasar berkualitas tinggi, adalah memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan penting lainnya yang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan dimasyarakat.
7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat, merupakan pendayagunaan seluruh potensi sumber

daya alam yang ada pada setiap wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

8. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Pekalongan membujur dari utara ke selatan, dan bagian utara Kabupaten Pekalongan masuk ke dalam daerah Pantai Utara yang merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Oleh karena itu, sebagian wilayah di Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa sehingga memiliki 11 desa pantai dari 285 desa/kelurahan yang ada.

Secara geografis, Kabupaten Pekalongan berada diantara $6^{\circ} - 7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} - 109^{\circ} 78'$ Bujur Timur. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan, luas daerah Kabupaten Pekalongan adalah $\pm 836,15$ km² atau sekitar 2,59% dari keseluruhan luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan, dimana terdapat 11 desa pantai dan 274 desa bukan desa pantai (BPS Kabupaten Pekalongan, 2021).

2.1.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan, ditahun 2020, Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebanyak 968.821 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas 491.607 penduduk laki-laki dan 477.214 penduduk perempuan, sehingga angka sex ratio di Kabupaten Pekalongan sebesar

103,02 yang berarti selama tahun 2020 lebih banyak penduduk laki-laknya jika dibandingkan jumlah perempuan.

Kabupaten Pekalongan memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya varians kepadatan penduduk antarkecamatan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan, ditahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.159 jiwa/km². Apabila ditinjau per kecamatan, Lebakbarang dan Petungkriyono adalah dua kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu kurang dari 200 jiwa/km². Sebaliknya, Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto merupakan empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang telah melampaui angka 4.000 jiwa/km².

2.2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pembantuan.

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

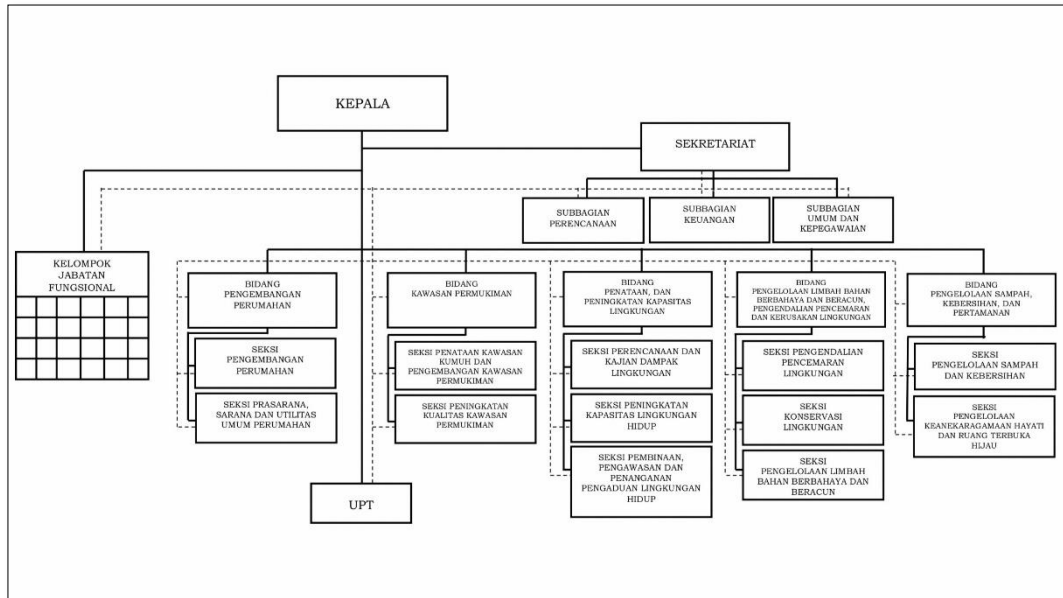
Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta mengevaluasi kebijakan dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang lingkungan hidup. Selain itu, juga memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan administrasi dan kesekretariatan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan pelayanan, serta tanggung jawab lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021, susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, UPT, dan lima bidang yaitu Bidang Pengembangan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Bidang Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan. Berikut adalah gambar susunan organisasi Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan.



Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan

Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021

2.3 Desa Samborejo

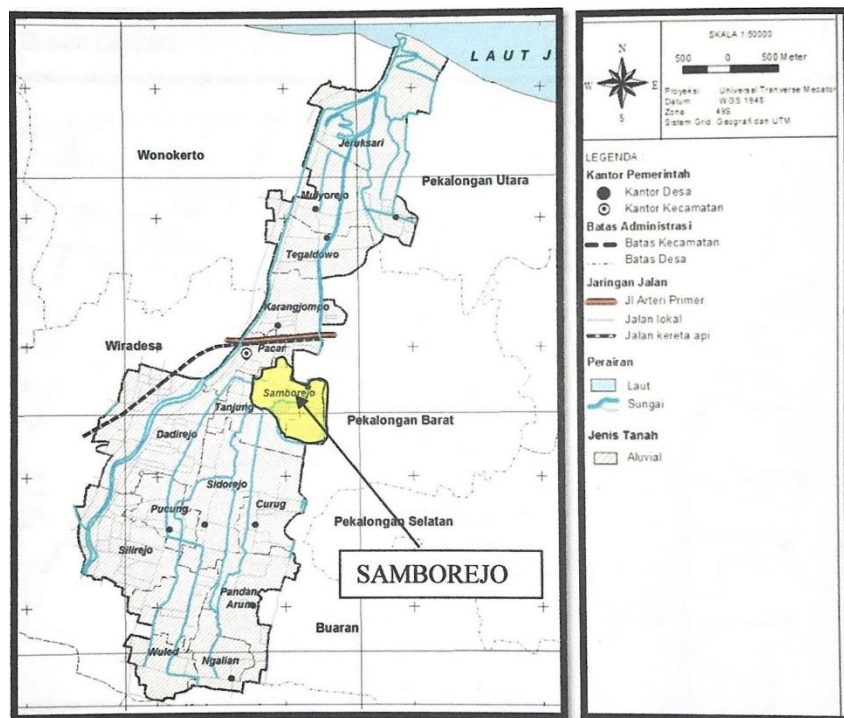
Desa Samborejo merupakan Desa yang berada di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Dilihat dari segi ekonomi, keadaan yang demikian menjadikan Desa Samborejo berpengaruh dalam perkembangan Kabupaten Pekalongan, khususnya dibidang industri produksi batik. Dengan potensi yang ada tersebut, secara tidak langsung menjadi penopang perekonomian masyarakat Samborejo. Namun, didalam perkembangan yang begitu pesat, muncul permasalahan dari berbagai aspek tata ruang, misalnya kependudukan, penataan permukiman, lingkungan dan sebagainya.

Berdasarkan pada dokumen RPJMDes Desa Samborejo tahun 2016-2022, permasalahan yang ada di Desa Samborejo dapat dipetakan menjadi beberapa masalah, antara lain terkait pemanfaatan fungsi lahan yang tidak semestinya,

kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pembuangan sampah dan limbah tanpa pengelolaan.

2.3.1. Kondisi Geografis

Desa Samborejo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pekalongan. Secara geografis, Desa Samborejo terletak pada 6° 53'44", 95" Lintang Selatan dan 109° 38'34",75" Bujur Timur. Desa Samborejo memiliki letak yang strategis dan termasuk sub wilayah pembangunan, dimana Desa Samborejo memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, industri, dan perikanan.



Gambar 2. 2 Konstelasi Wilayah Eksternal Desa Samborejo

Sumber: Dokumen RPJMDes Desa Samborejo Tahun 2016-2022

Luas wilayah Desa Samborejo mencakup 82,367 Ha, dengan batas-batas wilayah yang meliputi Desa Pacar (sebelah utara), Kelurahan Bumirejo Kota Pekalongan (sebelah selatan), Desa Tanjung (sebelah barat), dan Kelurahan

Tegalrejo Kota Pekalongan (sebelah timur). Secara administrative, Desa Samborejo terbagi menjadi 3 RW dan 9 RT serta terdiri atas 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Sringgit, Dusun Sambo Tengah, Dusun Mijen, dan Dusun Cokrah.

Secara topografis, Desa Samborejo merupakan daerah yang memiliki kelerengan 0-8% dengan karakteristik lahan yang relative datar dengan ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Desa Samborejo juga memiliki kondisi lahan yang relative cocok sebagai pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, maupun industri.

Dilihat dari segi kerawanan bencana, Desa Samborejo termasuk dalam kawasan yang rawan bencana banjir. Lokasi Desa Samborejo yang berada dekat dengan sungai dan adanya titik-titik cekungan tanpa ada jalur keluaran air ketika ditambah dengan curah hujan yang tinggi dapat menimbulkan bencana banjir. Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang terbiasa membuang sampah di sungai.

2.3.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data dalam dokumen RPJMDes Desa Samborejo tahun 2016-2022, jumlah penduduk Desa Samborejo adalah 5.062 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 2.572 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 2.490 jiwa. Distribusi penduduk terbanyak berada di RT 3 dengan jumlah penduduk sebanyak 443 jiwa. Sementara untuk jumlah penduduk paling sedikit berada di RT 13 dengan jumlah penduduk 195 jiwa.

Desa Samborejo juga memiliki sejumlah KK miskin yang tersebar hampir merata di setiap RT. Jumlah KK miskin paling banyak berada di RT 5 dengan

jumlah 52 KK, kemudian diikuti oleh RT 3 dengan jumlah KK miskin sebanyak 31 KK. Sementara jumlah KK miskin paling sedikit berada di RT 13 dengan jumlah 55 KK miskin.